

BAB - V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. SASARAN DAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN

Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, ditetapkan sasaran dan target kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dengan mengacu kepada PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
1) Tercapainya Indeks Pendidikan	1) Angka Melek Huruf penduduk usia >15 tahun 98,51 % 2) Rata-Rata Lama Usia Sekolah 10,11 Tahun 3) Angka Putus Sekolah 1,86 % 4) IPM menjadi 76,35 (Rangking 8 Nasional)
2) Meningkatnya Partisipasi Sekolah	5) APK PAUD 34 % 6) APK SD/MI 110 % 7) APM SD/MI 94 % 8) APK SMP/MTs 96 % 9) APM SMP/MTs 72 % 10) APK SLTA /MA 86 % 11) APM SLTA /MA 75 % 12) APK SMK 86 % 13) APM SMK 74,5 % 14) Ratio SMU = SMK 30 : 70
3) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan Pasca Sarjana	15) S1/D-IV 86 % 16) Pasca Sarjana (S2/S3) 20 %
4) Peningkatan Sertifikasi Guru	17) Guru bersertifikasi 10.000 Guru (<i>sudah tersertifikasi 235.855 guru dan sisa belum tersertifikasi 27.145 guru</i>)
5) Peningkatan Kesejahteraan Guru	18) Insentif Guru : Rp 900.000/thn/org
6) Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda	19) Terselenggaranya kegiatan kemah pertukaran pemuda 1 kegiatan
7) Meningkatnya seni budaya dan prestasi olahraga ditingkat lokal, nasional dan regional	20) Terselenggaranya event seni dan olahraga tingkat nasional 21) Terselenggaranya persiapan atlet untuk pencapaian prestasi olahraga rangking 5 pada Pekan Olah Raga Nasional 2016 22) Tersedianya desain rancang bangun fasilitas keolahragaan berskala internasional, 1 paket

2. Prioritas 2 : Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan

Sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
1) Tercapainya Indeks Kesehatan	1) Rata-Rata Usia Harapan Hidup 72,2 tahun 2) Angka Kematian Bayi 22/1000 KH 3) Angka Kematian Ibu Melahirkan menjadi 250/100.000 KH 4) Prevalensi balita kekurangan gizi menjadi 18%, (Gizi buruk 3%, Gizi kurang 15%)
2) Layanan Kesehatan Dasar	5) Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menjadi 90 % 6) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi menjadi 95 % 7) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menjadi 100% 8) Desa/kelurahan Universal Child Immunization menjadi 80 % 9) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD menjadi 100 % 10) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA menjadi 100% 11) Cakupan kunjungan bayi menjadi 95 % 12) Persentase Case Detection Rate (CDR) TB, 85 % dan persentase keberhasilan pengobatan 95 % 13) Cakupan Puskesmas menjadi Puskesmas ISO, Puskesmas Model Pelayanan Prima, dan Puskesmas Perkotaan menjadi 30 Unit 14) Cakupan atau ratio puskesmas/jumlah penduduk : 1 : 23.000 15) Cakupan atau ratio puskesmas pembantu (Pustu)/jumlah penduduk menjadi = 1 : 6.700
3) Pelayanan Kesehatan Rujukan	16) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 % 17) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 %
4) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa	18) Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam menjadi 100 %
5) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	19) Cakupan desa siaga aktif menjadi 35 %
6) Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	20) Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi 65 %
7) Upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin	21) Subsidi Jamkesmas 33 Kab/Kota 22) Subsidi Jampersal 33 Kab/Kota
8) Meningkatkan upaya lingkungan	23) Perbaiki sarana sanitasi dasar

sehat di perumahan dan permukiman perbaikan sarana sanitasi dasar untuk pemukiman kumuh dan keluarga miskin perkotaan	permukiman bagi keluarga miskin perkotaan 20 rumah
9) Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui revitaliasi Pos Yandu	24) Penyuluhan dan pelatihan bagi kader pelayanan kesehatan di pos yandu 2 kali 25) Penyebarluasan informasi melalui TV 12 kali, Radio 100 Kali, dan leflet, sticker, poster, 33 Kab/Kota.

3. Prioritas 3 : Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
1) Riset dan pengembangan Teknologi Tepat Guna	1) Jumlah pelaksanaan sosialisasi / diseminasi TTG 1 kali 2) Jumlah pelaksanaan kajian TTG 5 kajian
2) Riset dan pengembangan teknologi spesifik mendukung pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Andalan dan Kawasan Ekonomi Khusus	3) Jumlah kajian teknologi spesifik 7 kajian 4) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri dan Lembaga Riset lainnya

4. Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing perekonomian adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
1) Meningkatnya daya dukung kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan terutama pada Kawasan Andalan, Daerah Tujuan Wisata, Daerah yang cepat berkembang serta jalan Lintas Timur, Tengah, Barat dan Diagonal	1) Pembangunan/peningkatan jalan provinsi sepanjang 135,90 Km 2) Pemeliharaan berkala/rutin jalan provinsi sepanjang 2.861,68 Km 3) Pembangunan/ rehab jembatan 308 m 4) Pemeliharaan rutin jembatan 10.069,40 m 5) Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap 80% 6) Mendorong pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/ <i>Public Private Partnership</i>
2) Meningkatnya aksesibilitas wilayah pedesaan dan sentra produksi, wilayah perbatasan, terpencil	7) Pembangunan Jalan Produksi 50 km (lebar 3 m) 8) Pembangunan Jalan Usaha Tani 100

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
maupun kepulauan serta wilayah perkotaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan prasarana jalan	km (lebar 3m)
3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	9) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur irigasi lintas wilayah 17.151 Ha 10) Rehabilitasi/perbaiki dan peningkatan infrastruktur rawa lintas wilayah sebesar 5.350 Ha
4) Penyediaan dan pengelolaan air baku	11) Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana air baku di 33 embung/waduk
5) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	12) Terlaksananya pengendalian, pengawasan, pengolahan, pemeliharaan dan operasional sumber daya air
6) Pembangunan dan pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan pantai	13) Rehabilitasi/perbaiki dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan sungai/pantai sepanjang 203.694 m
7) Terbinanya perencanaan pengembangan sumber daya air	14) Inventarisasi daerah irigasi, rawa, kewenangan provinsi serta SID untuk perencanaan dan perbaikan sumber daya air
8) Meningkatnya ratio elektrifikasi	15) 88 %
9) Jumlah daya listrik	16) 2.698 MW
10) Rumah tangga pengguna air bersih	17) 88,2 %
11) Rumah layak huni	18) 1500 unit

5. Prioritas 5 : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
1) Meningkatnya produktifitas koperasi dan UKM	1) Laju pertumbuhan rata-rata koperasi 10-15%
2) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM	2) Laju pertumbuhan rata-rata 10%/tahun
3) Meningkatnya daya saing dan nilai ekspor produk koperasi dan pertumbuhan nilai tambah	3) 30 KUKM
4) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	4) 1.200 koperasi
5) Pemberdayaan usaha mikro dan menengah	5) 250.000 UMKM
6) Pembentukan Koperasi Primer	7) 300 unit
7) Terbinanya UMKM dalam sentra industri kecil	6) 300 UMKM
8) Peningkatan pengelolaan destinasi pemasaran dan SDM pariwisata	7) 3 Destinasi wisata utama (Danau Toba, Nias dan Berastagi) 8) 100 orang tenaga terlatih pariwisata
9) Peningkatan kunjungan wisatawan	9) Peningkatan jumlah kunjungan minimal

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
	10%
10) Kontribusi sub sektor pariwisata	10) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB sebesar 19,32% dan PDRB ADHB sebesar 19,12%

6. Prioritas 6 : Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas **Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan** diarahkan kepada sasaran utama yakni :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	<p>a. Sub-sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan target peningkatan produksi rata-rata sebesar 3%, diarahkan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Ketersediaan beras mencapai 2.260.872 ton, dengan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 3.991.970 ton 2). Luas panen padi mencapai 880.440 hektar dari luas tanam yang ditargetkan 898.408 Hektar 3). Produktifitas padi mencapai 45,34 kwintal/hektar 4). Produksi jagung mencapai 1.128.518 ton 5). Luas panen jagung mencapai 295.749 hektar dari luas tanam yang ditargetkan 301.785 hektar 6). Produktifitas jagung mencapai 38,16 kwintal/hektar 7). Produksi kedelai mencapai 57.771 ton 8). Luas panen kedelai mencapai 39.200 hektar dari luas tanam yang ditargetkan 49.000 hektar 9). Produktifitas kedelai mencapai 11,79 kwintal/hektar. 10) Luas pertanian organik 1 % dari total luas lahan pertanian <p>b. Sub-sektor Perkebunan, dengan target peningkatan ekspor sebesar 2,57%, diarahkan kepada tercapainya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Luas areal perkebunan Sumatera Utara mencapai 2.000.749,28 hektar. 2). Produksi perkebunan Sumatera Utara mencapai 17.500.000 ton. 3) Peremajaan areal tanaman tidak produktif (TTM) khususnya pada areal tanaman rakyat seluas 600 Ha.

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
	<p>c. Sub-sektor Peternakan, dengan target pertumbuhan produksi daging 4,25 %; telur 4,42 %; dan susu sebesar 9,74 %, diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan daging, telur dan susu melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produksi daging sapi 33.538,03 Ton 2) Penyediaan sapi lokal 658.359 Ekor 3) Peningkatkan biosekuriti untuk pengendalian Flu Burung 4) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan (ASUH) 5) Terkendalinya dan terbebasnya penyakit hewan menular strategis (Rabies, Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera, Avian Influenza) dan penyakit lainnya 6) Meningkatkan populasi, produktivitas dan produksi susu (sapi dan kambing perah) 849,42 Ton 7) Meningkatkan kualitas produksi susu 8) Meningkatkan produksi telur 143.772,74 Ton <p>d. Sub-sektor Perikanan dan Kelautan, diarahkan kepada terpenuhinya target :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produksi Perikanan Tangkap sebesar 569.418,9ton 2) Produksi Perikanan Budidaya sebesar 201.621ton 3) Nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 235.805.000 4) Konsumsi ikan per kapita sebesar 37,42 kg/kapita/tahun 5) Volume produk olahan hasil perikanan sebesar 59.795,53ton 6) Pendapatan rata-rata nelayan 2.593.380(Rp/bln/org) 7) Pendapatan rata-rata pembudidaya ikan 2.000.000 (Rp/bln/org) 8) Pendapatan pengolah dan pemasar hasil perikanan 1.848.892 (Rp/bln/org) 9) Jumlah UPI yang bersertifikat SKP sebanyak 30unit
2) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari; 2) berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1% setiap tahun 3) peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
	4) Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3; 5) Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat; 6) Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen; 7) Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.
3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor	8) Peningkatan ekspor komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh), komoditi hortikultura (kentang, kubis, jeruk, pisang, nenas) rata-rata sebesar 5%
4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peternak, Pekebun dan Nelayan	9) NTP Pertanian tanaman pangan 101,24 10) NTP pertanian tanaman hortikultura 115,20 11) NTP peternakan 107,32 12) NTN perikanan/kelautan 110,2 13) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB sebesar 21,06 % dan ADHK (2000) sebesar 22,35%
5) Terpeliharanya hutan dan penanganan lahan kritis	14) Luas lahan hutan yang direhabilitasi 3.000 Ha 15) Luas Lahan kritis yang direhabilitasi 2.000 Ha

7. Prioritas 7 : Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
1) Penurunan Angka Pengangguran Terbuka	1) Persentase Pengangguran Terbuka menjadi 6,0%
2) Penurunan Persentase Penduduk Miskin	2) Persentase penduduk miskin menjadi 10,2%
3) Penciptaan kesempatan kerja baru	3) Optimalisasi rumah produktifitas daerah bagi sarjana yang belum bekerja untuk 100 sarjana belum bekerja
	4) Mendorong penciptaan pengusaha pemula 12.000 pengusaha.

8. Prioritas 8 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
1. Meningkatnya kehidupan beragama dan keharmonisan antar umat beragama	1) Terselenggaranya kegiatan keagamaan khususnya aparatur, pemuda/pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2) Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan agama, lembaga pemuda, lembaga organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya, 1000 lembaga 3) Terlaksananya perbaikan kualitas rumah ibadah, 1000 unit
2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat	4) Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan untuk peningkatan wawasan kebangsaan, kegiatan
3. Meningkatnya iklim perpolitikan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum	5) terselesaikannya tata batas antar kabupaten/kota (7 Kab/Kota) dalam wilayah Provinsi dan dengan provinsi yang berbatasan dengan Sumatera Utara (Riau, Sumatera Barat) 6) Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan hukum dan politik, kegiatan.
4. Meningkatnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	7) Terwujudnya perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah 8) Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 9) Terlaksananya Penilaian dan penghargaan kepada SKPD Provinsi dan Kab/Kota atas prestasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, jenis penghargaan (akumulasi total kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Utara) 10) Terwujudnya Program Legislasi Daerah (Prolegda), Perda
5. Terciptanya persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum	11) Terlaksananya pembinaan hukum dan pendampingan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan hukum kegiatan

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
6. Terwujudnya iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah	12) Terciptanya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mendukung peningkatan pelayanan perijinan satu atap, perda
7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan	13) Terwujudnya peningkatan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif
8. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	14) Terwujudnya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	15) Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan	16) Terselaraskannya program perencanaan dan penganggaran minimal 90 % 17) Tersedianya hasil kajian perencanaan dan pengendalian pembangunan, 8 dokumen perencanaan 18) Terwujudnya peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan ekonomi, sosial budaya, sarana/prasarana dan penataan ruang/lingkungan hidup, kegiatan
11. Terwujudnya Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	19) Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD) secara elektronik (e-Planning) untuk mendukung e-Government, 1 Sistem Informasi
12. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah	20) Terlaksananya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan
13. Meningkatnya kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri dan dengan swasta	21) Terselenggaranya pertemuan dan forum kerjasama antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota, luar negeri dan swasta (<i>public private partnership</i>)

9. Prioritas 9 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah, yakni : Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2014
1) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)	1) Penurunan tingkat kemiskinan koridor sumatera yang menjadi quick wins pada lokasi yang akan di tentukan
2) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)	2) Mendorong Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 3) Mendorong Terasilitasinya pembangunan di KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun dan sekitarnya.
3) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana	

Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs)	
a. Tujuan (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan	<p>4) Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari menjadi 8,75 pada tahun 2015 dan menurunkan Indeks kedalaman kemiskinan</p> <p>5) Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 80.18%</p> <p>6) Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015, untuk pencapaian target 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi 14.05% • Prevalensi balita gizi buruk 2.15% • Prevalensi balita gizi kurang 11,90% <p>Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.400 kkal/kapita/hari 8.50 % • 2.000 kkal/kapita/hari 35.32%
b. Tujuan (2) mewujudkan pendidikan dasar	<p>7) Target 2A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dengan target 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A sebesar 100% • Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas akhir (kelas 6) SD/ MI sebesar 100% • Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun sebesar 98,51%
c. Tujuan (3) meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	<p>8) Target 3 A : menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/Paket A sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan Tinggi sebesar 100% - Rasio Melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun sebesar 100%

	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebesar 57% - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD minimal sebesar 25%
d. Tujuan (4) Penurunan angka kematian anak	<p>9) Target 4 (a) Menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun pada tahun 2015. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kematian anak di bawah lima tahun • Tingkat kematian bayi • Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi
e. Tujuan (5) Meningkatkan kesehatan ibu	<p>10) Menurunnya dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 2015. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratio kematian ibu • Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
f. Tujuan (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya	<p>11) Pada tahun 2015 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun. • Tingkat prevalensi kontrasepsi • Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS <p>12) Tahun 2015 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria • Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan. • Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC • Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan yang menjalankan pengobatan.
g. Tujuan (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	<p>Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang. Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio luas kawasan tertutup pepohonan

	<p>berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan Survei foto udara terhadap luas daratan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah emisi karbon dioksida (CO₂)e • Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) • Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
<p>h. Tujuan (8) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan erdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah emisi karbon dioksida (CO₂)e • Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) • Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 	<p>Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015, dengan target :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan <p>Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.</p>
<p>4) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terpenuhinya kebutuhan energi minimal 2.200 Kkal/kap/hari 2) Terwujudnya penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita menjadi 18 % 3) Terwujudnya penurunan prevalensi ukuran tubuh pendek balita menjadi 34 % 4) Terwujudnya penurunan daerah dengan kondisi rawan pangan menjadi 35 % 5) Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal 6) Terwujudnya peningkatan keragaman konsumsi pangan masyarakat 7) Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat 8) Terwujudnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 9) Terciptanya Kelembagaan Pangan dan Gizi yang kuat
<p>5) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 10) Terlaksananya kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca,
<p>6) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 11) Terwujudnya penyempurnaan/ Perbaikan Sistem Pelayanan Publik 12) Terwujudnya perbaikan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah 13) Terwujudnya penataan/ Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan 14) Terwujudnya penetapan dan pembinaan Program dan Wilayah Bebas Korupsi
<p>7) Dukungan pencapaian tujuan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 15) Terbentuknya komitmen pemerintah

Sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD - PUG)	daerah dalam pelaksanaan PUG
8) Mendukung sasaran pembangunan lainnya	16) Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 17) Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 18) Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan 19) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rumusan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang direncanakan untuk mendukung Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran-2.

5.3. PAGU INDIKATIF UNTUK TIAP SKPD

Dengan berpedoman kepada Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dan Arah Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab-III bahwa total dana Pagu Indikatif untuk Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 9.300.053.090.661,00. Maka dengan mengacu kepada anggaran tahun berjalan (APBD TA.2013), dengan memperhatikan sasaran/target prioritas dan program/kegiatan pada tahun anggaran 2014, maka dapat diuraikan Pagu Indikatif untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2014

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB	8.896.579.556.425	2.462.823.036.492	6.433.756.519.933
1	Pendidikan	224.242.531.925	185.000.000.000	39.242.531.925
1	Dinas Pendidikan	224.242.531.925	185.000.000.000	39.242.531.925
2	Kesehatan	306.780.034.916	202.500.000.000	104.280.034.916
1	Dinas Kesehatan	266.163.639.925	185.000.000.000	81.163.639.925
2	Rumah Sakit Jiwa Daerah	28.028.894.991	8.500.000.000	19.528.894.991
3	Rumah Sakit Haji Medan	12.587.500.000	9.000.000.000	3.587.500.000
3	Pekerjaan Umum	1.173.812.223.445	1.058.000.000.000	115.812.223.445
1	Dinas Bina Marga	967.045.103.534	913.000.000.000	54.045.103.534

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
	2 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	206.767.119.911	145.000.000.000	61.767.119.911
5	Penataan Ruang	177.258.620.405	145.000.000.000	32.258.620.405
	1 Dinas Penataan Ruang & Permukiman	177.258.620.405	145.000.000.000	32.258.620.405
6	Perencanaan Pembangunan	27.268.841.189	17.458.000.000	9.810.841.189
	1 Bappeda	27.268.841.189	17.458.000.000	9.810.841.189
7	Perhubungan	74.751.273.321	16.466.081.491	58.285.191.830
	1 Dinas Perhubungan	74.751.273.321	16.466.081.491	58.285.191.830
8	Lingkungan Hidup	26.477.092.415	16.500.871.113	9.976.221.302
	1 Badan Lingkungan Hidup	26.477.092.415	16.500.871.113	9.976.221.302
13	Sosial	92.252.225.696	53.932.183.493	38.320.042.203
	1 Dinas Kesejahteraan dan Sosial	92.252.225.696	53.932.183.493	38.320.042.203
14	Tenaga Kerja	39.755.512.477	15.935.000.000	23.820.512.477
	1 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	39.755.512.477	15.935.000.000	23.820.512.477
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	23.897.438.538	15.327.937.800	8.569.500.738
	1 Dinas Koperasi dan UKM	23.897.438.538	15.327.937.800	8.569.500.738
16	Penanaman Modal	44.570.749.319	35.889.825.341	8.680.923.978
	1 Badan Penanaman Modal dan Promosi	23.867.611.486	18.894.292.891	4.973.318.595
	2 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	20.703.137.833	16.995.532.450	3.707.605.383
17	Kebudayaan	36.664.514.011	20.030.388.250	16.634.125.761
	1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	36.664.514.011	20.030.388.250	16.634.125.761
18	Pemuda dan Olah Raga	27.207.793.057	20.085.000.000	7.122.793.057
	1 Dinas Pemuda dan Olahraga	27.207.793.057	20.085.000.000	7.122.793.057
19	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	50.461.438.101	36.772.313.610	13.689.124.491
	1 Badan Kesbang Linmas	17.339.835.726	10.648.438.800	6.691.396.926
	2 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	13.789.403.671	10.811.185.835	2.978.217.836
	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.332.198.704	15.312.688.975	4.019.509.729
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	6.471.678.492.596	568.935.487.210	5.902.743.005.386

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
1	DPRD	37.054.144.000	-	37.054.144.000
2	KDH & WKDH	3.550.836.555	-	3.550.836.555
3	Sekretariat Daerah	5.728.296.054.856	168.115.583.495	5.560.180.471.361
	<i>Biro Umum</i>	61.081.377.165	61.081.377.165	-
	<i>Biro Perlengkapan</i>	41.617.148.455	41.617.148.455	-
	<i>Biro Pemerintahan</i>	13.520.913.560	13.520.913.560	-
	<i>Biro Keuangan</i>	17.270.393.850	17.270.393.850	-
	<i>Biro Perekonomian</i>	4.344.408.500	4.344.408.500	-
	<i>Biro Binsos</i>	5.261.671.400	5.261.671.400	-
	<i>Biro Ortala</i>	7.023.318.000	7.023.318.000	-
	<i>Biro Otda</i>	6.543.927.500	6.543.927.500	-
	<i>Biro Pemberdayaan Perempuan</i>	3.977.701.440	3.977.701.440	-
	<i>Biro Pembangunan</i>	3.600.214.650	3.600.214.650	-
	<i>Biro Hukum</i>	3.874.508.975	3.874.508.975	-
	PPKD		-	2.112.647.168.776
4	Sekretariat DPRD	73.250.193.600	64.895.673.380	8.354.520.220
5	Badan Litbang	21.892.500.213	17.145.776.607	4.746.723.606
6	Inspektorat Daerah	27.996.446.528	16.408.031.750	11.588.414.778
7	Kantor Perwakilan Jakarta	13.944.376.091	9.281.397.217	4.662.978.874
8	Dinas Pendapatan	503.204.233.522	248.950.000.000	254.254.233.522
9	Badan Pendidikan dan Pelatihan	35.832.816.840	27.458.863.483	8.373.953.357
10	Badan Kepegawaian Daerah	20.849.242.020	12.610.161.278	8.239.080.742
11	Sekretariat KORPRI	5.807.648.371	4.070.000.000	1.737.648.371
12	Badan Penanggulangan Narkotika Provsu	-	-	-
21	Ketahanan Pangan	28.422.948.535	14.303.460.579	14.119.487.956
1	Badan Ketahanan Pangan	16.056.154.886	7.837.028.179	8.219.126.707
2	Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian	12.366.793.649	6.466.432.400	5.900.361.249
22	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	21.469.009.923	15.000.000.000	6.469.009.923
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.469.009.923	15.000.000.000	6.469.009.923
25	Komunikasi dan Informatika	25.961.514.032	11.186.487.605	14.775.026.427
1	Dinas Informasi dan Komunikasi	21.179.626.567	7.990.684.929	13.188.941.638
3	Komisi Penyiaran & Informasi Daerah	4.781.887.465	3.195.802.676	1.586.084.789
26	Perpustakaan	23.647.302.525	14.500.000.000	9.147.302.525
1	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	23.647.302.525	14.500.000.000	9.147.302.525
	URUSAN PILIHAN	403.473.534.236	246.582.885.393	156.890.648.843
1	Pertanian	227.403.762.565	152.955.615.793	74.448.146.772
1	Dinas Pertanian	145.380.600.748	94.000.000.000	51.380.600.748
2	Dinas Perkebunan	45.503.681.415	31.105.615.793	14.398.065.622
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan	36.519.480.403	27.850.000.000	8.669.480.403

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
	Hewan			
2	Kehutanan	47.313.757.996	12.500.000.000	34.813.757.996
1	Dinas Kehutanan	47.313.757.996	12.500.000.000	34.813.757.996
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	14.682.926.815	5.800.000.000	8.882.926.815
1	Dinas Pertambangan dan Energi	14.682.926.815	5.800.000.000	8.882.926.815
5	Kelautan dan Perikanan	79.018.028.313	65.000.000.000	14.018.028.313
1	Dinas Perikanan dan Kelautan	79.018.028.313	65.000.000.000	14.018.028.313
7	Industri	35.055.058.548	10.327.269.600	24.727.788.948
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.055.058.548	10.327.269.600	24.727.788.948

Rumusan Program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pencapaian target kinerja pada masing-masing program Prioritas Pembangunan berdasarkan fungsi dapat dilihat pada tabel Lampiran 3.

5.4. KAJIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKPD Tahun 2014 merupakan acuan bagi SKPD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara 2014 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2014 dengan sebaik-baiknya;

2. RKPDP Tahun 2014 menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD, dan Lembaga Pemerintah Daerah Non-Struktural dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014.
3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing SKPD perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan pagu sementara Tahun 2014 sebagai berikut:
 - a) Uraian penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tertuang dalam Bab-III, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Perda;
 - b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, maupun tugas yang berkaitan dengan pencapaian prioritas/program/kegiatan pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
4. Bagi Pemerintah Kabupaten/kota, RKPDP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2014 sebagai berikut:
 - a) Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Walikota ;
 - b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat;
 - d) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Rancangan RKPDP Tahun 2014, untuk memastikan keselarasan pembangunan di Kabupaten/Kota dengan prioritas, sasaran, target dan program/kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPDP Provinsi Sumatera Utara, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, dengan mendapatkan masukan dari SKPD Provinsi Sumatera Utara, dalam merumuskan matriks rencana program/kegiatan pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana program/kegiatan menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKPDP Kabupaten/Kota Tahun 2014;
5. Pelaksanaan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam RKPDP ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan

pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender.

6. Alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Kepada Kabupaten/Kota diperuntukkan untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan wajib menyesuaikan dengan Prioritas Pembangunan dan Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang pada Bab-IV dan Bab-V RKPD Tahun 2014.
7. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

7. Pada akhir tahun anggaran 2014, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturanperaturan lainnya;
8. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 bulan (triwulan) kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.